

Menko Polhukam Sebut Jangan Takut Perubahan Pasal Karet

Realitarakyat.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, bahwa hukum adalah produk resultante, dari perkembangan situasi politik, sosial ekonomi hingga hukum.

Oleh karena itu jangan alergi terhadap perubahan, karena hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakatnya.

“Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultante atau kesepakatan baru terkait kontroversi di dalam UU ITE. Hal tersebut bisa dilakukan, jika ditemukan substansi yang memiliki watak haatzai artikelen atau berwatak pasal karet,” kata Menko saat menjadi keynote speaker dalam diskusi daring Menyikapi Perubahan UU ITE yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamis (25/2/2021).

Dia juga mengatakan, pemerintah mempertimbangkan kemungkinan membuat resultante baru yang nantinya mencakup dua hal.

“Pertama, supaya dibuat kriteria implementatif. Apa kriterianya sebuah pasal, sebuah aturan itu, agar bisa diterapkan secara adil,” ucap Mahfud.

Kemudian yang kedua, lanjut dia, adalah menelaah kemungkinan dilakukannya revisi perubahan.

“Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet, maka bisa diubah dan bisa direvisi. Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu,” kata Mahfud.

Diskusi daring ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh pers.

Antara lain, Ketua Umum PWI Atal S Depari, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan Pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

Sebelumnya Menko Polhukam telah membentuk Tim kajian UU ITE.

Tim dibagi menjadi dua, yaitu Sub Tim I yang bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering menimbulkan multitafsir, dan Sub Tim II yang melakukan telaah substansi UU ITE atas beberapa pasal dalam UU yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan revisi.(Din)